

BAHASA, KEKUASAAN, DAN NASIONALISME DALAM PIDATO PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO: ANALISIS WACANA KRITIS MODEL ROGER FOWLER

Reka Yuda Mahardika¹, Indra Permana²

^{1,2}IKIP Siliwangi

Email: ¹rekayuda@ikipsiliwangi.ac.id, ²indrapermana@ikipsiliwangi.ac.id

Received: 21 Mei 2026; Accepted: 15 Juni 2026

Abstract

The inaugural speech of the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, in 2024 contains various narratives concerning national unity, self-reliance, and the interests of the people, making it an interesting object to be examined from the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA). This study aims to describe the construction of language, power, and nationalism in President Prabowo Subianto's speech based on Roger Fowler's Critical Discourse Analysis model. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. The data source was the transcript of President Prabowo Subianto's inaugural speech delivered on October 20, 2024. The research data consisted of words, phrases, clauses, sentences, and paragraphs containing representations of nationalist ideology. The data were collected through documentation, observation, and note-taking techniques. Data analysis employed Roger Fowler's analytical framework, namely classification, limitation of view, marginalization, and discourse struggle. Classification was used to construct a collective national identity through diction representing unity and nationalism. Limitation of view was realized through the use of modalities that directed the public toward the importance of self-reliance and national interests. Marginalization was reflected in the representation of poverty, corruption, and dependency as obstacles to national progress. Meanwhile, discourse struggle demonstrated an ideological alignment with nationalism, national sovereignty, and public welfare. Therefore, President Prabowo Subianto's speech can be understood as a discursive practice that employs language as an instrument of power to construct and legitimize the ideology of nationalism.

Keywords: critical discourse analysis, Roger Fowler, language, power, nationalism, political speech.

Abstrak

Pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tahun 2024 memuat berbagai narasi mengenai persatuan, kemandirian bangsa, dan kepentingan rakyat yang menarik untuk dikaji melalui perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi bahasa, kekuasaan, dan nasionalisme dalam pidato Presiden Prabowo Subianto berdasarkan model Analisis Wacana Kritis Roger Fowler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian berupa naskah pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024. Data penelitian berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf yang mengandung representasi ideologi nasionalisme. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, simak, dan catat. Analisis data menggunakan model perangkat analisis Roger Fowler, yaitu pengklasifikasian, pembatasan pandangan, pamarjinalan, dan pertarungan wacana. Pengklasifikasian digunakan untuk membangun identitas kolektif bangsa melalui diksi yang merepresentasikan persatuan dan kebangsaan. Pembatasan pandangan direalisasikan melalui

penggunaan modalitas yang mengarahkan masyarakat pada pentingnya kemandirian dan kepentingan nasional. Pemarjinalan ditunjukkan melalui representasi terhadap kemiskinan, korupsi, dan ketergantungan sebagai persoalan yang menghambat kemajuan bangsa. Sementara itu, pertarungan wacana memperlihatkan adanya keberpihakan ideologis terhadap nasionalisme, kedaulatan bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pidato Presiden Prabowo Subianto merupakan praktik diskursif yang menggunakan bahasa sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun dan melegitimasi ideologi nasionalisme.

Kata kunci: analisis wacana kritis, Roger Fowler, bahasa, kekuasaan, nasionalisme, pidato politik.

PENDAHULUAN

Bahasa pada hakikatnya tidak pernah hadir sebagai medium yang netral. Setiap penggunaan bahasa selalu membawa kepentingan, nilai, dan ideologi tertentu yang berupaya memengaruhi cara masyarakat memahami realitas. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai instrumen sosial yang berfungsi membangun, mempertahankan, dan melegitimasi relasi kekuasaan dalam masyarakat. Thompson (1987) menyatakan bahwa studi mengenai ideologi pada dasarnya merupakan studi mengenai bagaimana makna digunakan untuk mempertahankan hubungan dominasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, bahasa memiliki posisi yang sangat strategis karena melalui bahasa suatu kelompok dapat mengonstruksi realitas sesuai dengan kepentingannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK) yang memandang bahasa sebagai praktik sosial. Dalam perspektif ini, bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga turut membentuk realitas itu sendiri. Fowler (1991) menjelaskan bahwa setiap pilihan linguistik, baik berupa kosakata, struktur kalimat, maupun strategi representasi tertentu, selalu merefleksikan perspektif ideologis penuturnya. Oleh sebab itu, analisis terhadap bahasa sesungguhnya merupakan upaya untuk mengungkap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan yang tersembunyi di balik sebuah teks.

Hubungan antara bahasa dan ideologi tampak sangat jelas dalam praktik komunikasi politik. Politik pada dasarnya merupakan arena pertarungan makna dan kepentingan yang diwujudkan melalui bahasa. Melalui bahasa, seorang aktor politik dapat membangun legitimasi, menciptakan identitas kolektif, dan memperoleh dukungan publik. Fairclough (1995) menyatakan bahwa bahasa dalam praktik politik tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memproduksi dan mereproduksi relasi kekuasaan. Dengan demikian, pidato politik tidak dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas retorik, melainkan sebagai praktik diskursif yang sarat dengan muatan ideologis.

Salah satu bentuk komunikasi politik yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kesadaran publik adalah pidato presiden. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki otoritas simbolik yang menjadikan setiap tuturan politiknya berpotensi membentuk persepsi masyarakat mengenai kondisi bangsa dan arah masa depan negara. Pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 merupakan salah satu peristiwa kebahasaan yang menarik untuk dikaji karena memuat berbagai narasi mengenai persatuan, kemandirian bangsa, kepentingan rakyat, pemberantasan korupsi, serta cita-cita Indonesia yang berdaulat dan berdiri di atas kaki sendiri. Narasi tersebut menunjukkan adanya upaya membangun identitas kolektif bangsa melalui ideologi nasionalisme.

Nasionalisme dalam pidato politik tidak dapat dipahami sekadar sebagai ungkapan kecintaan terhadap tanah air, melainkan sebagai strategi diskursif untuk membangun kesadaran bersama mengenai siapa "kita" dan ke mana bangsa ini akan diarahkan. Melalui pilihan diksi tertentu, seorang pemimpin politik dapat mengonstruksi kategori-kategori sosial, menentukan pihak yang diposisikan sebagai bagian dari kelompok "kita" dan "mereka", sekaligus menghadirkan ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam perspektif Roger Fowler, proses tersebut merupakan bentuk pengklasifikasian, pamarjinalan, pembatasan pandangan, dan pertarungan wacana yang merepresentasikan ideologi tertentu.

Penelitian mengenai hubungan antara bahasa dan ideologi telah banyak dilakukan. Habiburrahim et al. (2020) menemukan bahwa praktik kebahasaan dalam implementasi syariat di Aceh merepresentasikan identitas dan ideologi tertentu yang dibangun melalui pilihan bahasa. Demikian pula Ahmadi, Kurniawan, dan Kusumawardhani (2022) menunjukkan bahwa media massa memiliki kecenderungan ideologis yang berbeda dalam merepresentasikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa penggunaan bahasa tidak pernah bebas nilai dan selalu berkaitan dengan kepentingan tertentu. Penelitian yang dilakukan Mahardika dan Taufik (2023) juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam media massa dilakukan melalui strategi pengklasifikasian, pamarjinalan, dan pembatasan pandangan yang bermuara pada pembentukan ideologi tertentu. Mahardika (2026) yang meneliti mengenai tuturan politik yang dituturkan Rocky Gerung beroleh temuan bahwa penggunaan majas merepresentasikan ideologi si penutur itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan penggunaan bahasa terhadap sebuah realitas tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan berkaitan dengan keberpihakan dan kepentingan ideologis yang melatarbelakanginya. Bahasa bahkan dapat digunakan untuk membangun citra, menghasilkan stigmatisasi, dan mengarahkan persepsi masyarakat terhadap suatu kelompok sosial. Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa bahasa memiliki daya ideologis yang kuat dalam membentuk kesadaran publik.

Meskipun kajian mengenai Analisis Wacana Kritis telah berkembang cukup pesat, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan nasionalisme dalam pidato Presiden Prabowo Subianto masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan kajian pada teks media massa, film, dan pemberitaan daring. Padahal, pidato presiden merupakan bentuk komunikasi politik yang strategis karena tidak hanya merepresentasikan pandangan seorang pemimpin, tetapi juga menjadi representasi ideologi negara dan arah kebijakan pemerintahan yang akan dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam mengonstruksi ideologi nasionalisme dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengklasifikasian, pamarjinalan, pembatasan pandangan, dan pertarungan wacana sebagaimana dikemukakan Roger Fowler. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis di Indonesia serta memperkaya kajian mengenai relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam komunikasi politik kontemporer.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menginterpretasikan fenomena kebahasaan secara mendalam, khususnya berkaitan dengan relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang direpresentasikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji bahasa tidak hanya

sebagai struktur linguistik, melainkan juga sebagai praktik sosial yang sarat dengan kepentingan ideologis (Creswell, 2018).

Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan fenomena kebahasaan yang ditemukan dalam data penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana ideologi nasionalisme dikonstruksi melalui pilihan bahasa dalam pidato Presiden Prabowo Subianto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Roger Fowler. Dalam perspektif Fowler (1991), bahasa dipandang sebagai instrumen ideologis yang digunakan untuk mengonstruksi realitas sosial. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang direpresentasikan melalui pilihan kosakata dan struktur kebahasaan.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah naskah pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Data penelitian berupa satuan lingual yang meliputi: kata; frasa; klausa; kalimat; dan paragraf yang mengandung representasi bahasa, kekuasaan, dan nasionalisme dalam pidato tersebut. Satuan lingual tersebut dipilih karena dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, ideologi tidak hanya hadir pada tataran makro, tetapi juga dapat ditemukan pada pilihan leksikal dan gramatikal yang digunakan oleh penutur (Fowler, 1991).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik simak-catat. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa naskah pidato Presiden Prabowo Subianto yang diperoleh melalui laman resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia dan sumber resmi lainnya yang mempublikasikan pidato tersebut. Teknik simak dilakukan dengan membaca secara intensif keseluruhan teks pidato untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kemunculan wacana. Teknik catat dilakukan dengan mencatat satuan-satuan lingual yang mengandung unsur ideologi, relasi kekuasaan, dan nasionalisme. Data yang ditemukan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan perangkat analisis Roger Fowler.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan secara langsung dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, serta menarik simpulan (Moleong, 2021). Untuk membantu proses analisis, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa: kartu data; tabel klasifikasi data; dan pedoman analisis berdasarkan model Roger Fowler.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat perangkat analisis Roger Fowler, yaitu: pengklasifikasian; pembatasan andangan; Pemarjinalan; pertarungan wacana.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teori dan ketekunan pengamatan. Yaitu, temuan penelitian dibandingkan dengan berbagai teori mengenai bahasa, ideologi, nasionalisme, dan Analisis Wacana Kritis, khususnya teori Roger Fowler, Norman Fairclough, dan Teun A. van Dijk. Kemudian peneliti membaca dan menganalisis data secara berulang-ulang untuk memperoleh interpretasi yang mendalam serta meminimalisasi subjektivitas dalam penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 ditemukan bahwa konstruksi bahasa, kekuasaan, dan nasionalisme direpresentasikan melalui empat perangkat analisis Roger Fowler, yaitu pengklasifikasian, pembatasan pandangan, pamarjinalan, dan pertarungan wacana. Keempat perangkat tersebut menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian gagasan politik, melainkan juga sebagai instrumen ideologis untuk membangun kesadaran kolektif mengenai kebangsaan dan arah pembangunan Indonesia.

Pengklasifikasian

Pengklasifikasian merupakan upaya mengategorikan individu, kelompok, maupun peristiwa tertentu melalui pilihan kosakata tertentu (Fowler, 1991). Dalam pidato Presiden Prabowo ditemukan sejumlah pengklasifikasian yang mengarah pada pembentukan identitas kolektif bangsa.

Tabel 1. Pengklasifikasian dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto

Data	Bentuk Pengklasifikasian
"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air."	Mengklasifikasikan seluruh rakyat sebagai satu komunitas nasional.
"Bangsa yang besar."	Mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keagungan dan potensi besar.
"Rakyat Indonesia."	Mengonstruksi identitas kolektif sebagai satu kesatuan politik.
"Bangsa yang berani."	Mengategorikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan pantang menyerah.
"Saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan."	Mengklasifikasikan kelompok masyarakat yang masih mengalami ketimpangan sosial.

Berdasarkan data tersebut, pengklasifikasian yang digunakan Presiden Prabowo cenderung berorientasi pada pembentukan identitas nasional dan solidaritas kebangsaan.

Pembatasan Pandangan

Pembatasan pandangan merupakan penggunaan bahasa untuk mengarahkan dan mengontrol cara masyarakat memahami suatu realitas (Fowler, 1991).

Tabel 2. Pembatasan Pandangan dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto

Data	Bentuk Pembatasan Pandangan
"Kita tidak boleh puas."	Mengarahkan masyarakat untuk menolak kondisi yang ada.
"Kita harus berdiri di atas kaki sendiri."	Mengarahkan pandangan agar bangsa Indonesia bersikap mandiri.
"Kita harus berani menghadapi tantangan."	Membatasi persepsi bahwa keberanian merupakan solusi atas persoalan bangsa.
"Kepentingan rakyat harus di atas segalanya."	Mengarahkan masyarakat agar mengutamakan kepentingan publik.

"Indonesia tidak boleh bergantung pada bangsa lain."	Membentuk pandangan mengenai pentingnya kedaulatan nasional.
--	--

Data tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo secara aktif membangun perspektif tertentu mengenai masa depan Indonesia melalui penggunaan modalitas seperti *harus* dan *tidak boleh*.

Pemarjinalan

Pemarjinalan merupakan proses menempatkan individu, kelompok, atau kondisi tertentu dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Tabel 3. Pemarjinalan dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto

Data	Bentuk Pemarjinalan
"Kemiskinan."	Diposisikan sebagai persoalan yang harus dilawan bersama.
"Korupsi."	Direpresentasikan sebagai ancaman bagi bangsa.
"Ketergantungan terhadap pihak lain."	Diposisikan sebagai kondisi yang tidak ideal bagi negara.
"Kelaparan dan kesengsaraan."	Direpresentasikan sebagai realitas yang harus dihilangkan.

Berdasarkan data tersebut, pemarjinalan dalam pidato Presiden Prabowo tidak diarahkan kepada kelompok sosial tertentu, melainkan kepada berbagai persoalan nasional yang dipandang menghambat kemajuan bangsa.

Pertarungan Wacana

Pertarungan wacana merupakan representasi keberpihakan ideologis melalui penggunaan bahasa tertentu.

Tabel 4. Pertarungan Wacana dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto

Wacana Pertama	Wacana Kedua
Kemandirian bangsa	Ketergantungan pada bangsa lain
Persatuan nasional	Perpecahan
Kepentingan rakyat	Kepentingan kelompok
Keadilan sosial	Ketimpangan
Pemberantasan korupsi	Praktik korupsi

Pertarungan wacana tersebut menunjukkan adanya keberpihakan ideologis pada nasionalisme, kedaulatan bangsa, dan kesejahteraan rakyat.

Temuan Penelitian

Secara keseluruhan ditemukan empat kecenderungan utama dalam pidato Presiden Prabowo Subianto.

1. Dominannya penggunaan kosakata yang membangun identitas nasional.
2. Penggunaan modalitas yang kuat untuk mengarahkan cara pandang masyarakat.
3. Pemarjinalan terhadap persoalan-persoalan yang dianggap menghambat kemajuan bangsa.

4. Keberpihakan ideologis terhadap nasionalisme, kemandirian, dan persatuan nasional.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pidato seremonial, melainkan praktik diskursif yang digunakan untuk membangun kesadaran kebangsaan dan melegitimasi arah politik pemerintahan melalui bahasa.

Pembahasan

Pengklasifikasian sebagai Upaya Membangun Identitas Kolektif Bangsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara dominan menggunakan kosakata yang mengarah pada pembentukan identitas kolektif bangsa, seperti *saudara-saudara sebangsa dan setanah air*, *rakyat Indonesia*, dan *bangsa yang besar*. Penggunaan diksi tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai alat kohesi linguistik, melainkan sebagai strategi ideologis untuk membangun kesadaran kolektif mengenai identitas kebangsaan.

Dalam perspektif Roger Fowler (1991), pengklasifikasian merupakan proses linguistik yang digunakan untuk mengategorikan individu, kelompok, atau peristiwa tertentu sehingga khalayak memahami realitas melalui perspektif yang telah dibingkai oleh penutur. Bahasa pada akhirnya tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga mengonstruksinya. Melalui penggunaan kosakata *bangsa yang besar* dan *bangsa yang berani*, Presiden Prabowo berupaya menghadirkan citra Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Konstruksi identitas semacam ini merupakan karakter utama dari wacana nasionalisme. Nasionalisme tidak hanya dibangun melalui simbol-simbol kenegaraan, tetapi juga melalui praktik kebahasaan yang secara terus-menerus mengonstruksi kesadaran mengenai siapa "kita" sebagai sebuah bangsa (Anderson, 2006). Penggunaan pronomina *kita* dan frasa *saudara-saudara sebangsa dan setanah air* menunjukkan adanya upaya membangun *imagined community* atau komunitas terbayang yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda ke dalam identitas nasional yang sama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Habiburrahim et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa bahasa memiliki kemampuan untuk mengonstruksi identitas sosial dan ideologi tertentu melalui pilihan kebahasaan. Demikian pula penelitian Mahardika dan Taufik (2023) yang menunjukkan bahwa penggunaan kosakata tertentu mampu membangun citra dan persepsi tertentu terhadap suatu kelompok sosial. Dengan demikian, pengklasifikasian yang dilakukan Presiden Prabowo tidak dapat dipandang sebagai pilihan linguistik yang bersifat kebetulan, melainkan sebagai strategi diskursif untuk memperkuat solidaritas kebangsaan.

Pembatasan Pandangan sebagai Strategi Pengarahan Kesadaran Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa modalitas *harus* dan *tidak boleh* mendominasi pidato Presiden Prabowo. Ungkapan seperti *kita harus berdiri di atas kaki sendiri*, *kita harus berani menghadapi tantangan*, dan *kita tidak boleh puas* menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan dan membatasi cara pandang masyarakat terhadap kondisi bangsa.

Fowler (1991) menjelaskan bahwa pembatasan pandangan terjadi ketika bahasa digunakan untuk menuntun khalayak agar memahami realitas melalui perspektif tertentu. Dalam konteks pidato Presiden Prabowo, modalitas yang digunakan menunjukkan adanya keberpihakan ideologis terhadap gagasan kemandirian nasional, optimisme, dan kerja kolektif.

Pilihan kata *harus* mengandung makna keharusan yang bersifat normatif dan imperatif. Kata tersebut tidak memberikan ruang alternatif kepada khalayak untuk memahami persoalan bangsa dari perspektif lain. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai instrumen simbolik yang mengarahkan masyarakat agar menerima pandangan tertentu sebagai sesuatu yang benar dan ideal.

Menurut Fairclough (1995), praktik diskursif dalam komunikasi politik merupakan bagian dari praktik kekuasaan karena bahasa dapat digunakan untuk mengontrol pengetahuan, membangun legitimasi, dan mengarahkan tindakan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan modalitas dalam pidato Presiden Prabowo menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kepemimpinan politik.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ahmadi, Kurniawan, dan Kusumawardhani (2022) yang menemukan bahwa pilihan bahasa dalam media massa dapat mengarahkan masyarakat untuk menerima suatu ideologi tertentu melalui proses pembingkaihan (*framing*) terhadap realitas sosial.

Pemarjinalan terhadap Kondisi yang Dipandang Menghambat Kemajuan Bangsa

Penelitian ini menemukan bahwa pidato Presiden Prabowo memarjinalkan berbagai persoalan nasional seperti kemiskinan, korupsi, ketergantungan terhadap bangsa lain, dan ketimpangan sosial. Berbeda dengan pemarjinalan yang umumnya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu, pemarjinalan dalam pidato ini diarahkan kepada kondisi sosial yang dipandang menghambat kemajuan bangsa.

Dalam perspektif Roger Fowler (1991), pemarjinalan merupakan strategi representasi yang menempatkan pihak tertentu pada posisi negatif sehingga memunculkan keberpihakan ideologis tertentu. Penggunaan diksi *korupsi*, *kemiskinan*, dan *ketergantungan* sebagai ancaman nasional menunjukkan adanya upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perubahan sosial.

Pemarjinalan terhadap korupsi, misalnya, tidak hanya menunjukkan sikap moral penutur, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun legitimasi politik bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula pemarjinalan terhadap ketergantungan ekonomi menunjukkan keberpihakan ideologis pada gagasan kemandirian bangsa.

Menurut Van Dijk (1998), ideologi pada hakikatnya merupakan sistem keyakinan yang digunakan untuk mengorganisasi representasi sosial suatu kelompok. Oleh karena itu, pemarjinalan terhadap berbagai persoalan nasional dalam pidato Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai upaya membangun sistem keyakinan kolektif mengenai pentingnya mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

Pertarungan Wacana dan Konstruksi Ideologi Nasionalisme

Temuan penelitian menunjukkan adanya pertarungan wacana antara kemandirian dan ketergantungan, persatuan dan perpecahan, kepentingan rakyat dan kepentingan kelompok, serta keadilan sosial dan ketimpangan. Pertarungan wacana tersebut memperlihatkan adanya keberpihakan ideologis terhadap nasionalisme dan kedaulatan bangsa.

Menurut Fowler (1991), bahasa merupakan arena pertarungan ideologi. Setiap teks pada dasarnya merepresentasikan pandangan tertentu mengenai realitas sekaligus menolak pandangan yang lain. Dalam pidato Presiden Prabowo, nasionalisme dikonstruksi melalui oposisi antara kondisi ideal yang ingin dicapai dengan berbagai persoalan yang dianggap menghambat terwujudnya cita-cita bangsa.

Konstruksi semacam ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak dipahami sekadar sebagai rasa cinta tanah air, melainkan sebagai proyek politik yang dibangun melalui praktik diskursif. Bahasa digunakan untuk membangun optimisme, memperkuat solidaritas nasional, dan menghasilkan legitimasi terhadap arah kebijakan pemerintahan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Anderson (2006) yang menyatakan bahwa bangsa pada dasarnya merupakan komunitas terbayang yang dibangun melalui praktik simbolik dan

diskursif. Dalam konteks ini, pidato Presiden Prabowo berfungsi sebagai instrumen simbolik yang membangun kesadaran kolektif mengenai identitas kebangsaan dan masa depan Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipandang sekadar sebagai pidato seremonial pada momentum pelantikan presiden. Pidato tersebut merupakan praktik diskursif yang sarat dengan kepentingan ideologis. Melalui pengklasifikasian, pembatasan pandangan, pamarjinalan, dan pertarungan wacana, bahasa digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun dan mereproduksi ideologi nasionalisme serta mengarahkan persepsi masyarakat mengenai arah pembangunan bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tahun 2024 merupakan praktik diskursif yang sarat dengan muatan ideologis dan relasi kekuasaan. Melalui perspektif Analisis Wacana Kritis model Roger Fowler, ditemukan empat bentuk representasi bahasa yang menunjukkan konstruksi ideologi nasionalisme, yaitu pengklasifikasian, pembatasan pandangan, pamarjinalan, dan pertarungan wacana.

Pertama, pengklasifikasian direpresentasikan melalui penggunaan kosakata seperti *bangsa yang besar*, *rakyat Indonesia*, dan *saudara-saudara sebangsa dan setanah air* yang berfungsi membangun identitas kolektif dan solidaritas kebangsaan. Pilihan leksikal tersebut menunjukkan adanya upaya mengonstruksi kesadaran bersama mengenai Indonesia sebagai bangsa yang memiliki persatuan, kekuatan, dan potensi besar untuk mencapai kemajuan.

Kedua, pembatasan pandangan ditunjukkan melalui penggunaan modalitas seperti *harus* dan *tidak boleh* yang mengarahkan masyarakat pada cara pandang tertentu mengenai kondisi dan masa depan bangsa. Melalui pilihan bahasa tersebut, Presiden Prabowo membangun perspektif mengenai pentingnya kemandirian nasional, keberanian menghadapi tantangan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, pamarjinalan dalam pidato ini tidak diarahkan kepada kelompok sosial tertentu, melainkan terhadap berbagai persoalan nasional, seperti kemiskinan, korupsi, ketergantungan terhadap pihak lain, dan ketimpangan sosial. Berbagai persoalan tersebut direpresentasikan sebagai ancaman yang menghambat kemajuan bangsa dan harus diatasi secara kolektif. Pamarjinalan tersebut sekaligus menunjukkan keberpihakan ideologis terhadap cita-cita Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.

Keempat, pertarungan wacana tampak melalui oposisi antara kemandirian dan ketergantungan, persatuan dan perpecahan, kepentingan rakyat dan kepentingan kelompok, serta keadilan sosial dan ketimpangan. Pertarungan wacana tersebut memperlihatkan bahwa pidato Presiden Prabowo dibangun di atas ideologi nasionalisme yang menekankan pentingnya kedaulatan bangsa, persatuan nasional, dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, melainkan juga sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun, mereproduksi, dan melegitimasi ideologi nasionalisme. Melalui pilihan bahasa yang digunakan, pidato tersebut berupaya membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai identitas kebangsaan dan arah pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan yang baru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis, khususnya model Roger Fowler, serta menjadi rujukan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam wacana politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Y., Kurniawan, M. H., & Kusumawardhani, P. (2022). Ideologi jpnn.com dan merdeka.com dalam wacana putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 187–197. <https://doi.org/10.29300/disastra.v4i2.6395>.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised ed.). London: Verso.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fowler, R. (1991). *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. London: Routledge.
- Habiburrahim, H., Rahmiati, Z., Muluk, S., Akmal, S., & Aziz, Z. A. (2020). Language, identity, and ideology: Analysing discourse in Aceh sharia law implementation. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 9(3), 599–607. <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i3.23210>.
- Mahardika, R. Y., & Taufik, I. N. (2023). Disfemisme pada pemberitaan korupsi di media massa daring. *Semantik*, 12(1), 75–88. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i1.p75-88>.
- Mahardika, Reka Yuda. (2026). Majas sebagai Strategi Kritik Kekuasaan dalam Tuturan Rocky Gerung: Analisis Semantik Kritis Wacana politik. *Pedagogia Humaniora*, 1 (1), 2026.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qianbo, L. (2016). Theoretical Framework of Critical Discourse Analysis. *Studies in Literature and Language*, 13(5), 36–40.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thompson, J. B. (1987). Language and ideology: A framework for analysis. *The Sociological Review*, 35(3), 516–536. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1987.tb00554.x>.
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage Publications.